

**ANALISIS KETERLIBATAN TURKI DALAM KONFLIK ANTARA
ARMENIA-AZERBAIJAN TAHUN 2020-2022**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

FAQIH DHEA FITRATNA

19323046

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

**ANALISIS KETERLIBATAN TURKI DALAM KONFLIK ANTARA
ARMENIA-AZERBAIJAN TAHUN 2020-2022**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

FAQIH DHEA FITRATNA

19323046

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

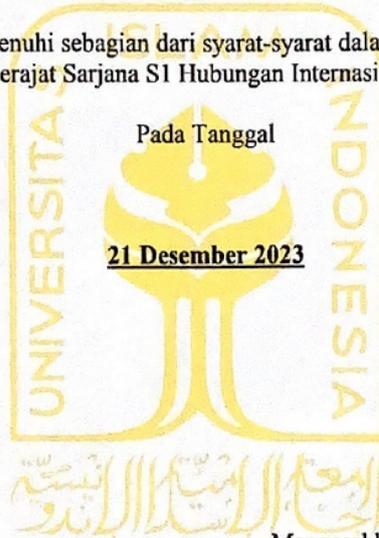
**ANALISIS KETERLIBATAN TURKI DALAM KONFLIK ANTARA
ARMENIA-AZERBAIJAN TAHUN 2020-2022**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

21 Desember 2023

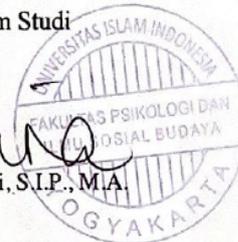


Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.



Dewan Penguji

- 1 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.
- 2 Mohamad Rezky Utama, S.IP., M.Si.
- 3 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan

Hadza
Mohamad
Karina

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 21 December 2023



Faqih Dhea Fitratna

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
ABSTRAK	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Cakupan penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	6
1.6 Kerangka Pemikiran.....	8
1.7 Argumen Sementara	11
1.8 Metode Penelitian.....	12
1.8.1 Jenis Penelitian.....	12
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	13
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	13
1.8.4 Proses Penelitian	13
1.9 Sistematika Pembahasan	13
BAB 2.....	15
Sejarah terjadinya konflik antara Armenia dan Azerbaijan	15
2.1. Sejarah keterlibatan Turki pada konflik Armenia dan Azerbaijan ...	15
2.2 Politik Luar Negeri Turki di Armenia dan Azerbaijan	21
BAB 3	29
Analisis Defensif Realisme terkait dengan keterlibatan Turki dalam Konflik di Nagorno-Karabakh	29
3.1 Faktor Internal	32
3.1.1 Bentuk Kepemimpinan	32
3.1.2 Bentuk Politik Luar Negeri	33
3.2 Faktor Eksternal.....	35

3.2.1 Kerjasama Internasional	35
3.2.2 Kedekatan Hubungan	36
3.2.3 Ketergantungan Ekonomi.....	38
3.2.4 Persaingan Antar Elit Politik	39
3.2.5 Kebebasan Media.....	41
BAB 4	43
PENUTUP	43
4.1. Kesimpulan	43
4.2 Rekomendasi	45
DAFTAR PUSTAKA	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Peta Geografis Armenia dan Azerbaijan 19

Gambar 1.2. Twitter Mesut Ozil pada 14 Oktober 2020 43

DAFTAR SINGKATAN

AK : *Adalet ve Kalkinma*

ASSR : *Azerbaijan Soviet Socialist Republic*

BBC : *Broadcasting Bina Creative*

CNN : *Cable News Network*

CSTO : *Collective Security Treaty Organization*

EPNK : *European Partnership for Peaceful Settlement of the Conflict of
Nagorno-Karabakh*

NATO : *North Atlantic Treaty Organization*

ISIS : *Islamic State of Iraq and Syria*

OSCE : *Organization for Security and Co-operation in Europe*

PBB : *Perserikatan Bangsa-Bangsa*

UN : *United Nation*

SCP : *South Caucasus Pipeline*

SCRWO : *State Committee for Work with Religious Organizations*

TAP : *Trans Adriatic Pipeline*

TANAP : *Trans Anatolian Natural Gas Pipeline*

TIKA : *Turkish Cooperation and Coordination Agency*

ABSTRAK

Konflik yang terjadi antara Armenia dan Azerbaijan dengan memperebutkan wilayah Nagorno-Karabakh sudah terjadi sejak runtuhnya Uni Soviet tahun 1988 hingga sekarang. Akibat peperangan yang tak kunjung usai, banyak negara di sekitar wilayah konflik mulai ikut serta untuk mendamaikan peperangan yang sedang terjadi. Banyak dari negara yang ikut terlibat tersebut memiliki kepentingan masing-masing. Memperluas pengaruh politik negara dan mengamankan sumber daya alam yang terdapat pada Nagorno-Karabakh menjadi alasan utama kepentingan para negara-negara ikut dalam konflik ini. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penulisan ini adalah defensif realisme yang digagas oleh Kenneth Waltz. Turki sebagai negara yang aktif dalam segala proses mediasi yang terjadi antara Armenia dan Azerbaijan, secara tersirat Turki mendukung Azerbaijan untuk bisa mengamankan wilayah Nagorno-Karabakh. Di lain sisi, Turki tidak mengakui bahwa mereka langsung terlibat dalam konflik tersebut. Turki terindikasi bahwa mereka ingin menguasai wilayah Nagorno-Karabakh karena terdapat sumber daya alam serta ingin merubah ketergantungan pasokan sumber daya gas yang sebelumnya berasal dari Rusia. Turki ingin lepas dari pengaruh Rusia dan ingin bergantung pada pasokan energi dari Azerbaijan.

Kata-kata kunci: Konflik, Militer, Keamanan Energi, Intervensi.

ABSTRACT

The conflict between Armenia and Azerbaijan over the Nagorno-Karabakh region has been going on since the collapse of the Soviet Union in 1988 until now. As a result of the unending war, many countries around the conflict area began to participate to reconcile the ongoing war. Many of the countries involved have their own interests. Expanding the country's political influence and securing the natural resources contained in Nagorno-Karabakh are the main reasons for the interests of the countries participating in this conflict. The framework used in this paper is defensif realisme initiated by Kenneth Waltz. Turkey as a country that is active in all mediation processes that occur between Armenia and Azerbaijan, Turkey implicitly supports Azerbaijan to be able to secure the Nagorno-Karabakh region. On the other hand, Turkey does not admit that they are directly involved in the conflict. Turkey indicated that they wanted to control the Nagorno-Karabakh region because of the natural resources and wanted to change the dependence of gas resources supply that previously came from Russia. Turkey wants to escape the influence of Russia and wants to depend on energy supplies from Azerbaijan.

Keywords: Conflict, Military, Energy Security, Intervention.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik yang terjadi antara Azerbaijan dan Armenia memang berbasis pada perebutan wilayah yang sangat strategis yakni Nagorno-Karabakh. Kedua negara tersebut saling melancarkan serangan satu sama lain namun juga saling menuduh siapa yang memulai dulu peperangan terlebih dahulu. Kedua negara ini merupakan pecahan negara Uni Soviet dan terletak di daerah geografis Kaukasus Selatan. Sebenarnya, wilayah Nagorno-Karabakh ini bermayoritaskan penduduk dari etnis Armenia akan tetapi mereka berada dalam zona wilayah teritorial kekuasaan negara Azerbaijan dan kebanyakan dari para penduduk meminta digabungkan dengan pemerintahan Armenia. Permintaan itu jelas jelas ditolak oleh pemerintah Azerbaijan dikarenakan merasa bahwa wilayah Nagorno-Karabakh merupakan wilayah teritorial negara mereka. Dan hal tersebut juga tidak disetujui oleh Uni Soviet pada saat itu karena enggan melakukan alih wilayah Nagorno-Karabakh ke Armenia. Lalu ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991 wilayah Nagorno-Karabakh sontan langsung mendeklarasikan kemerdekaan sebagai negara sendiri dan melepas status yurisdiksi Azerbaijan (Cornell 1999).

Walaupun sudah beberapa kali mengadakan pertemuan, namun kedua negara masih saja melakukan berbagai pelanggaran. Armenia dan Azerbaijan seakan lupa bahwa mereka sudah terikat perjanjian gencatan senjata. Beberapa pertempuran terjadi di rentang tahun 2010 hingga 2016 dan tak sedikit korban berjatuhan mulai dari anggota militer hingga warga sipil turut menjadi korban atas peperangan tersebut. Sebagai contoh kejadian pada 2010, setidaknya terdapat 4

anggota militer dari Armenia dan seorang anggota militer Azerbaijan gugur dalam peperangan konflik. Lalu terjadi lagi konflik dengan skala besar di tahun 2014 yang terjadi di perbatasan Nagorno-Karabakh setidaknya terdapat 18 korban tewas dan menggugurkan sebuah helikopter milik Armenia. Dua tahun berselang yakni pada tahun 2016, keadaan semakin parah setelah terjadi peperangan besar besaran oleh militer Azerbaijan dengan menggunakan senjata lengkap seperti helikopter, tank serta persenjataan kaliber besar. Melibatkan militer dan warga sipil sebanyak setidaknya 350 orang sebagai korban jiwa. Dengan terjadinya kejadian tersebut bisa dikatakan sebagai titik pecah dari konflik Armenia dan Azerbaijan (Hartati 2020).

Seiring dengan konflik yang semakin berlarut-larut, kedua negara ini mengalami intervensi dari berbagai negara mulai dari Rusia hingga Amerika Serikat. Namun negara-negara tersebut lebih melakukan kebijakan yang cenderung mendukung Armenia. Setelah sekian lama akhirnya Turki hadir untuk membantu Azerbaijan melalui beberapa forum mediasi internasional dengan mendukung Azerbaijan serta menjelaskan yang berkaitan dengan konflik tersebut dari *point of view* Azerbaijan. Turki juga menyindir Rusia serta Amerika Serikat yang sebelumnya negara tersebut sangat mendominasi forum karena mereka pro-Armenia. Bukan hanya itu saja, namun Turki juga menolak adanya normalisasi baik kebijakan dan budaya Armenia yang melekat pada beberapa wilayah kekuasaan Azerbaijan. Disisi lain Turki telah menghentikan pasokan persenjataan dan bantuan materil kepada Azerbaijan (Cornell 1998). Eratnya hubungan kerjasama politik antara Azerbaijan dan Turki ini bisa berjalan dengan baik karena geografis dari Turki yang menguntungkan dikarenakan Turki berada di antara benua Asia dan Eropa. Hal tersebut sangat membantu Turki untuk menjadi perantara penyaluran

sumber daya hidrokarbon dari negara yang tersebar di Laut Kaspia dan didistribusikan ke negara-negara Mediterania dan Eropa. Kerja sama ekonomi dan energi juga menambah eratnya hubungan Azerbaijan dan Turki dikarenakan Turki menempatkan Azerbaijan pada prioritas kebijakan politik luar negerinya, diantaranya adalah :

1. Dukungan Azerbaijan atas Nagorno-Karabakh
2. Membatasi dan menahan Rusia untuk memberikan pengaruh di wilayah Transkaukasus
3. Ikut serta dalam proses produksi sumber daya minyak dan membantu memasarkan pasokan minyak Azerbaijan ke Turki dalam jumlah besar

Berdasarkan beberapa poin yang telah dijelaskan, Turki secara terbuka telah menyetujui dan menandatangani kesepakatan ekonomi serta perdagangan dengan Azerbaijan (Cornell 2005).

Wilayah Kaukasus Selatan adalah sebuah daratan yang memiliki nilai penting serta strategis bagi Turki. Di lain hal, Turki juga memiliki hubungan bilateral yang sangat erat dengan Georgia dan Azerbaijan namun disatu sisi perselisihan dengan Armenia membuat Kaukasus Selatan menjadi fokus utama kebijakan luar negeri pemerintah Turki. Selain menjadi wilayah yang strategis, Kaukasus Selatan juga menjadi penghubung bagi Turki dengan negara yang berada di Asia Tengah dimana kebanyakan dari negara tersebut berbahasa Turki. Bukan hanya alasan itu saja namun Turki juga mempunyai ketertarikan dengan cadangan energi di Cekungan Kaspia dan Asia Tengah yang luar biasa besar membuat Turki mengambil dan menerbitkan kebijakan proaktif dengan sasaran kawasan yang jauh

lebih besar (Kardaş 2015). Dengan runtuhnya eksistensi Uni Soviet dan keriuhan yang terjadi di Nagorno-Karabakh bahkan konflik Bosnia dan Bulgaria menjadikan Turki sebagai aktor yang memiliki andil besar dalam wilayah Azerbaijan, Kaukasus Selatan serta Asia Tengah (Evoyan 2013).

Konflik yang terjadi di Nagorno-Karabakh ini memang memiliki alasan sejarah dari masing masing negara yakni Armenia dan Azerbaijan. Kedua negara saling mengklaim wilayah yang diperebutkan walaupun Azerbaijan telah diakui oleh hukum internasional sebagai tuan di wilayah Nagorno-Karabakh tersebut. Akan tetapi pemerintah Armenia sudah mendiami wilayah tersebut terhitung sejak Uni Soviet resmi runtuh. Secara harfiah, kawasan Nagorno-Karabakh ini memiliki julukan yang berbeda beda. Dalam bahasa Rusia “Nagorno” berarti “Gunung”, selain itu masyarakat Armenia menyebutnya “Artzakh”, sedangkan dalam bahasa Azerbaijan kawasan tersebut memiliki julukan Dagliq Karabakh atau Yukari (Cornell 1999).

Kesamaan bahasa, budaya dan etnis menjadikan Azerbaijan mempunyai hubungan erat bersama Turki terlebih di wilayah Kaukasus Selatan. Bukan hanya itu Turki menjadi garda terdepan pada saat ekonomi Azerbaijan mengalami pertumbuhan menuju ekonomi internasional serta Turki juga mengirim bantuan untuk melawan Armenia dalam memperjuangkan wilayah Nagorno-Karabakh yang terjadi pada tahun 1988 hingga 1994. Usaha yang dilakukan oleh Turki untuk menjalin hubungan bilateral bersama Azerbaijan yakni dengan mengembangkan integritas wilayah serta mewujudkan potensi ekonomi yang tertuju pada sumber daya alam dari Laut Kaspia. Akan tetapi presiden Azerbaijan yang menjabat pada saat itu yakni Haydar Aliyev sangat mempunyai andil besar

akan kelangsungan kerjasama negaranya dengan Turki. Amerika Serikat, Turki serta Eropa Barat menjalin aliansi formal yang membuat Azerbaijan untuk membuat hubungan lebih dengan Turki terhitung sejak kemerdekaan negaranya (Strakes 2017).

Bukan hanya hubungan ekonomi saja namun Turki dan Azerbaijan juga memiliki kerjasama militer yang bisa dikatakan cukup dekat. Tercatat Azerbaijan telah menugaskan pasukan militer penjaga perdamaian ke Kosovo pada akhir tahun 1990-an yang diawasi langsung oleh tentara Turki. Kerjasama militer antara kedua negara ini berubah menjadi sektor yang penting dalam hubungan Turki dan Azerbaijan. Pembebasan wilayah Azerbaijan dari kekuasaan masyarakat Armenia menjadi salah satu contoh pentingnya kerjasama militer Turki dan Azerbaijan (Otzarsu 2011).

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Mengapa Turki terlibat dalam konflik antara Armenia dan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan berfokus pada alasan detail mengapa Turki ikut serta dalam konflik yang terjadi antara Armenia dan Azerbaijan di wilayah Nagorno-Karabakh pada tahun 2020-2022. Penulis juga akan menganalisis ambisi Turki dalam peperangan/konflik yang terjadi di wilayah Nagorno-Karabakh.

1.4 Cakupan penelitian

Dalam penulisan ini, penulis mencoba melakukan analisa terkait dengan keterlibatan Turki pada konflik yang terjadi antara Armenia dan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh pada tahun 2020 hingga 2022. Penelitian ini akan diawali dengan pembahasan terkait hadirnya Turki dalam konflik pada tahun 2020. Dimana pada September 2020 terjadi peperangan antara Armenia dan Azerbaijan dan Turki memberikan bantuan persenjataan militer kepada Azerbaijan. Senjata artileri, roket, rudal serta kendaraan perang merupakan bantuan yang dikirim oleh Turki untuk membantu Azerbaijan pada saat perang berlangsung tahun 2020. Pada tahun 2021 Turki mendapat tuduhan dari Armenia karena terindikasi pesawat tempur milik Turki melakukan tembakan yang mengakibatkan satu jet tempur Armenia gugur. Pada pertengahan tahun 2022, Turki terlibat kembali dengan mengirim bantuan, melakukan latihan militer dan juga membuat strategi perang kepada Azerbaijan. Tak lama setelah itu pada bulan September 2022, Azerbaijan dan Armenia saling melakukan penyerangan di sekitar perbatasan wilayah Nagorno. Bantuan yang Turki lakukan ini merupakan untuk mencapai kepentingan nasional agar bisa memperluas pengaruhnya terutama di kawasan Kaukasus Selatan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Jurnal yang berjudul “Konflik Azerbaijan dengan Armenia Atas Wilayah Nagorno-Karabakh dalam Konteks Hukum Internasional” (Hartati 2020). Menjelaskan tentang bagaimana konflik antara Armenia dengan Azerbaijan terjadi. Penulis juga menjelaskan secara detail bagaimana awal mula terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh kedua negara demi mendapatkan wilayah Nagorno-Karabakh. Dalam jurnal ini memberi beberapa informasi terkait

bagaimana posisi Nagorno-Karabakh ini yang secara *de facto* masuk dalam wilayah Azerbaijan namun secara *de jure* masuk dalam wilayah Armenia dan hal tersebutlah yang memicu adanya intervensi dari negara-negara lain untuk masuk dalam konflik kedua negara tersebut.

Pada jurnal yang berjudul “Konflik Armenia dan Azerbaijan Serta Upaya Damai Masyarakat Internasional” (Lisbet 2020). Penulis menjelaskan bahwasanya PBB, Oki, Uni Eropa serta masyarakat internasional meminta untuk pimpinan dari kedua negara yang berkonflik untuk melakukan mediasi dalam menyelesaikan konflik. Dalam jurnal ini memberikan data bahwa dengan adanya konflik ini memberikan dampak negatif untuk masyarakat internasional dikarenakan wilayah yang diperebutkan dalam konflik ini merupakan daerah aliran energi gas alam serta minyak bumi yang didistribusikan ke banyak negara dan dikhawatirkan akan merusak kestabilan kongsi dagang serta ekonomi dunia. Penulis juga berharap bahwasanya ada banyak negara yang bisa ikut membantu mendamaikan kedua negara dan memberikan solusi damai atas semua masalah yang terjadi dalam konflik ini.

Pada artikel yang berjudul “Kegagalan Upaya Mediasi Antara Armenia dan Azerbaijan Dalam Konflik Nagorno-Karabakh” (Fatoni 2019). Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa runtuhnya Uni Soviet merupakan cikal bakal terjadinya konflik antara Armenia dan Azerbaijan. Dibentuknya sebuah organisasi internasional yakni OSCE atau singkatan dari *Organization for Security and Co-operation in Europe* yang diharapkan mampu untuk mendamaikan kedua negara ini dinilai gagal dalam menjalankan tanggung jawab yang telah diberikan oleh *United Nation*. Adanya rasa ketidakpercayaan antara Armenia dan Azerbaijan membuat organisasi ini sulit

mendapatkan pemahaman tentang permasalahan konflik yang sedang terjadi berakibat rumitnya usaha mediasi untuk kedua negara yang sedang berkonflik. Dalam artikel ini juga dijelaskan bahwa organisasi OSCE tidak bisa melakukan *track two diplomacy* yang seharusnya bisa menyelesaikan permasalahan dalam konflik ini.

Berdasarkan dari beberapa jurnal yang telah dikumpulkan terkait dengan konflik Armenia dan Azerbaijan. Sebagian besar dari jurnal jurnal tersebut membahas tentang sejarah bagaimana awal terjadinya konflik tersebut bisa terjadi dan peranan dari *OSCE-Minsk Group* yang diberikan tanggung jawab untuk memfasilitasi kedua negara tersebut untuk berunding dan berdamai. Mulai dari situ penulis memahami jika masih belum ada artikel yang membahas spesifik tentang keterlibatan dan alasan Turki dalam konflik di kawasan Nagorno-Karabakh.

1.6 Kerangka Pemikiran

Untuk menganalisa dan meninjau studi kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini penulis menggunakan teori defensif realisme untuk meninjau keterlibatan Turki dalam konflik ini. Defensif realisme yang merupakan turunan dari teori struktural realisme ciptaan dari seorang filsuf yang bernama Kenneth N. Waltz. Teori ini menjelaskan bahwasanya defensif realisme berfokus pada *balance of power* serta berasumsi bahwasannya dasar dari sebuah negara untuk saling menjaga keseimbangan yang lebih umum dibandingkan bersekutu dengan negara lain. Struktur anarkis yang ada di sistem internasional akan mendorong suatu negara untuk dapat menjaga dan membuat kebijakan yang bersifat moderat dan hati-hati dalam mencapai sistem keamanan. Pada buku yang berjudul “Theory of Internasional Politics”, Kenneth Waltz mengatakan negara berusaha untuk

mengupayakan keamanan mereka dengan cara menyeimbangkan kekuatan dengan negara lain. Defensif realisme menegaskan jika ekspansi yang bersifat agresif seperti yang dilakukan ofensif realism akan berdampak pada negara yang ingin sesuai dengan teori *Balance of Power* dan menghambat tujuan utama negara, yakni memastikan keamanan (Waltz 1979).

Perubahan struktural yang didasari pada kemampuan suatu negara untuk mendistribusikan suatu strategi militer dan diplomatik tertentu. Hal tersebut mengakibatkan sebuah dilema yang dialami suatu negara dengan kemampuan terbatas baik pada keamanan, menjalin kerjasama ataupun subsistem regional. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perubahan struktur dapat dilakukan dengan memikirkan urgensi sistematis perilaku sebuah negara (Waltz 1979).

Cara terbaik dalam menjalin sebuah kondisi bagaimana sebuah negara untuk bertahan dari sektor keamanan adalah dengan melakukan kebijakan yang bersifat moderat dan tidak pasif maupun agresif. Melakukan sistem kekuasaan sporadis secara terpaksa hanya akan menimbulkan dilema keamanan dan tindakan tersebut juga sangat tidak bijak. Defensif realisme sangat menentang terjadinya gagasan keamanan yang menimbulkan konflik yang berkelanjutan, Kenneth Waltz lebih mementingkan peninjauan terhadap kelemahan ataupun celah celah yang bisa menimbulkan terjadinya sebuah konflik. Pada intinya defensif realisme ini mengatakan bahwasannya ketika sebuah negara itu mempunyai kekuatan bertambah maka negara tersebut merasa jika suatu ancaman itu tidak hanya berkembang serta berpengaruh di lingkup kekuasaannya namun juga di daerah yang sebenarnya jauh dari jangkauan atau teritorial negara tersebut (Waltz 1979).

Waltz menganggap bahwa sebuah negara terlalu memaksakan diri untuk menjalin kerjasama yang tidak menguntungkan untuk dapat mempertahankan kekuasaan. Dapat dilihat dari titik terendah sebuah negara, mereka tidak memikirkan keuntungan jangka panjang dalam melakukan hubungan bilateral dan terlihat seolah tidak memungkinkan untuk dilakukan terutama pada sektor keamanan dikarenakan masing masing negara memiliki pola pemikiran atau intensif yang berbeda untuk mempertahankan keamanan baik dengan negara sekutu maupun negara pesaing (Waltz 1979).

Pada buku yang berjudul “Isu-Isu Terpilih Dalam Hubungan Malaysia Dengan Negara Serantau Asia Tenggara” karya Ramli Dollah tahun 2019. Menjelaskan tentang pemikiran defensif realisme, bahwa sebenarnya struktur pada dunia internasional itu hanya akan bekerja secara signifikan disaat tertentu saja. Hal tersebut sangat bergantung pada kekuatan masing-masing negara yang bisa dikategorikan menjadi dua yakni negara dengan *low pressure* dan *high pressure*. Dari buku itu, defensif realisme memiliki beberapa poin penting yang bisa menjadi acuan dalam meninjau studi kasus ini, adapun poin dari defensif realisme diantaranya adalah;

1. Faktor internal meliputi : bentuk kepemimpinan dan bentuk politik luar negeri.
2. Faktor eksternal meliputi : kerjasama internasional, kedekatan hubungan, ketergantungan ekonomi, persaingan elit politik dan kebebasan media.

Dengan adanya 2 poin ini, akan terbukti menghasilkan satu *output* dari keterlibatan Turki dalam konflik yang terjadi di Nagorno-Karabakh, diantaranya adalah bersikap tegas atau nasionalis, mengimbangi, kompromi dan tidak ada tindakan (Dollah 2019).

Meski defensif realisme mengesampingkan kepentingan dalam negeri karena terkesan memberatkan, namun tidak serta merta defensif realisme mengagap kepentingan dalam negeri tidak penting. Peran yang berupa tinjauan dalam negeri pada teori defensif realisme merupakan hal yang mutlak. Dengan begitu, defensif realisme merupakan sebuah pendekatan yang sangat fleksibel karena memperbolehkan sebuah negara untuk membuat kebijakan berdasarkan tinjauan dalam negeri guna memosisikan sikap yang berkaitan dengan konflik/permasalahan yang sedang dihadapi. Hal tersebut juga dapat digunakan untuk meraih posisi yang sama jika pada suatu konflik/permasalahan berhadapan langsung dengan *offensive* realism maupun neorealisme. Pemikiran yang berbeda ditujukan pada sistem pendekatan neorealisme dimana pada pendekatan tersebut memiliki pemikiran jika suatu sistem internasional sangat dipengaruhi oleh kegiatan interaksi atas dasar organisasi internasional. Jelas hal ini sangat mengesampingkan kepentingan dalam negeri suatu yang karena hanya melakukan suatu kebijakan dalam belenggu rezim organisasi internasional (Dollah 2019).

1.7 Argumen Sementara

Dengan melalui teori defensif realisme yang mengatakan bahwa ketika sebuah negara itu mempunyai kekuatan bertambah maka negara tersebut merasa jika suatu ancaman itu tidak hanya berkembang serta berpengaruh di lingkup kekuasaannya namun juga di daerah yang sebenarnya jauh dari jangkauan atau

teritorial negara tersebut. Dari sini dapat disimpulkan jika Turki mempunyai kepentingan untuk membantu Azerbaijan meskipun jika diamati dengan baik, Turki sama sekali tidak menyatakan apa urgensi mereka membantu Azerbaijan. Akan tetapi jika Azerbaijan mendapatkan *pressure* dan pengaruh dari berbagai pihak yang kontra dengan Azerbaijan, Turki merasa bahwa itu adalah ancaman bagi negaranya. Dan ditambah dengan adanya indikasi bahwasannya Turki mempunyai kepentingan untuk mengintervensi kawasan Kaukasus Selatan yang dimana kawasan tersebut menjadi penghubung bagi Turki dengan negara yang berada di Asia Tengah dimana kebanyakan dari negara tersebut berbahasa Turki. Selain itu, alasan lain mengapa Turki ikut membantu Azerbaijan karena kedekatan hubungan antara kedua negara tersebut yang sudah terjalin lama. Kerja sama di bidang politik, ekonomi dan energi menjadi landasan terkuat mengapa Turki hingga saat ini masih setia mendampingi Azerbaijan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, penulis beranggapan bahwa jenis penelitian yang cocok untuk digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Pemilihan metode kualitatif berdasarkan karena metode ini dapat menjadi alat untuk menjelaskan serta menganalisis permasalahan dalam karya ilmiah, selain itu, metode kualitatif menggunakan dekripsi yang tentunya memudahkan penulis dalam proses pengumpulan data.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Penulisan ini berusaha untuk menganalisa keterlibatan Turki dalam konflik yang terjadi antara Armenia dan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh. Sehingga subjek dalam penulisan ini adalah Turki sebagai aktor yang terlibat dalam konflik, sedangkan objek penulisan yang penulis teliti adalah alasan Turki terlibat dalam konflik di Nagorno-Karabakh pada tahun 2020-2022.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam metode ini penulis mengumpulkan data melalui studi pustaka. Cara tersebut dilakukan untuk mendapatkan sumber data sekunder yang berasal dari literasi akademik seperti jurnal, buku, maupun sumber berita yang bersifat kredibel.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam proses penelitian penulis akan menggunakan data serta literatur yang telah dikumpulkan dan diseleksi sesuai dengan keterkaitan topik dalam penelitian ini melalui sumber yang akurat

1.9 Sistematika Pembahasan

Dalam melakukan penelitian penulis membagi rencana pembahasan ke dalam beberapa bab. Sistematika pembahasan

Bab 1 membahas tentang latar belakang serta sejarah terjadinya perang konflik antara Armenia dan Azerbaijan.

Bab 2 berisikan alasan detail mengapa Turki ikut dalam konflik perang Armenia-Azerbaijan. Apa saja kepentingan masuk serta menjadi penengah dalam perang ini.

Bab 3 menjelaskan tentang korelasi Teori dengan keterlibatan Turki atas konflik yang terjadi antara Armenia dan Azerbaijan dan menjawab rumusan masalah.

Bab 4 adalah bagian kesimpulan yang menjawab pertanyaan atau rumusan masalah dalam penulisan ini.

BAB 2

Sejarah terjadinya konflik antara Armenia dan Azerbaijan

2.1. Sejarah keterlibatan Turki pada konflik Armenia dan Azerbaijan

Jika melihat dari sejarahnya, hubungan Turki dan Azerbaijan sudah terjalin sejak 1991 yakni setelah Azerbaijan berhasil meraih kemerdekaan negaranya. Turki merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Azerbaijan, tepatnya pada bulan November tahun 1991. Bukan tanpa alasan Turki begitu peduli dengan keberadaan Azerbaijan sebagai negara baru pada saat itu. Heydar Aliyev yakni pemimpin rezim yang berkuasa di Azerbaijan pada saat itu berhasil membuat pasokan cadangan gas dan minyak Azerbaijan berkembang secara cepat. Dan menempatkan ibu kota mereka yakni Baku sebagai pusat dari pengembangan ini. Heydar Aliyev juga yang pertama menjalin hubungan dan membujuk Turki agar mau membantu Azerbaijan untuk dapat memenangkan dan menguasai wilayah Nagorno-Karabakh. Kerjasama diplomatik yang terjalin antara Turki dan Azerbaijan dimulai sejak Januari 1992 ditandai dengan adanya Konsulat Jenderal yang berada di ibu kota Azerbaijan yakni Baku. Turki pun merespon kejadian tersebut dengan membuat Kedutaan Besar Azerbaijan di Ankara dan membangun Konsulat Jenderal yang berada di Kars dan Istanbul (Abisatya 2022).

Kecenderungan Turki untuk mendukung Azerbaijan juga dilandasi oleh faktor kesamaan budaya. Terdapat sebuah konsep yang bernama "*Outside Turks*", konsep tersebut untuk mengklasifikasikan persebaran sporadis Turki dengan akar bahasa dan kebudayaan yang sama. Banyak dari negara yang berada disekitar Turki yang terindikasi masuk kedalam klasifikasi konsep ini diantaranya adalah

Kazakhstan, Turkmenistan, Kirgistan, Uzbekistan dan Azerbaijan. Kebanyakan dari negara-negara tersebut menggunakan bahasa Turki selain bahasa nasional mereka masing-masing. Lalu terdapat satu slogan yang diciptakan oleh mantan pemimpin Azerbaijan yakni Heydar Alivey, slogan tersebut diberi nama “One State, Two Nations”. Slogan ini tercipta karena kedekatan Turki dan Azerbaijan yang begitu erat satu sama lain. Maka slogan tersebut menjadi bahan bakar bagi kedua negara untuk tetap menjalin kedekatan dan saling membantu satu sama lain (Abisatya 2022).

Turki mempunyai tujuan dalam konflik yang terjadi di Nagorno-Karabakh ini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, dengan melakukan dukungan secara penuh terhadap Azerbaijan untuk bisa memenangkan Nagorno-Karabakh, Turki ingin mengendalikan negara-negara pendukung Armenia sekaligus para pendiri dari OSCE Minsk Group yakni Rusia, Amerika Serikat dan Prancis. Dan tujuan yang kedua, Turki sangat menginginkan status sebagai negara dengan pengaruh regional yang kuat agar bisa memenangkan proses mediasi yang diselenggarakan untuk Armenia dan Azerbaijan (Isachenko 2020).

Setelah bisa melepaskan diri dari campur tangan Uni Soviet, Azerbaijan menaruh kepercayaan penuh terhadap Turki sebagai negara yang bisa diandalkan bukan hanya membantu pada integrasi di politik internasional, namun Azerbaijan bergantung pada Turki untuk mengembangkan pasukan militer mereka untuk bisa memenangkan peperangan yang terjadi di Nagorno-Karabakh. Adanya perjanjian yang dilakukan oleh Azerbaijan dan Turki yang telah disepakati oleh kedua negara di tahun 2010, menjadi kerangka hukum atas bantuan-bantuan yang diberikan Turki kepada Azerbaijan (Isachenko 2020).

Ibu kota Azerbaijan yakni Baku mendapat bantuan dari Ankara untuk bisa mengubah status quo mereka dalam konflik di Nagorno-Karabakh. Pada 2020 tepatnya dibulan Maret, Hulusi Akar selaku Menteri Pertahanan Turki mengeluarkan *statement* bahwa Turki sudah memperluas pengaruh yang lebih kuat terlebih pada kawasan Kaukasus Selatan, Timur Tengah, Laut Tengah Timur Aengea hingga Balkan. Menurut Halusi Akar, berkat peran Erdogan, Turki telah berubah menjadi aktor utama dalam politik internasional. Erdogan juga berhasil menempatkan Turki sebagai negara yang setara dengan Rusia dan Amerika Serikat ditengah-tengah konflik Nagorno-Karabakh (Isachenko 2020).

Adanya campur tangan dari Turki untuk membantu Azerbaijan dalam konflik di Nagorno-Karabakh memang banyak sekali menimbulkan pengaruh dimensi baru yang dinilai positif. Dilain sisi, Turki juga mencoba untuk menjaga kestabilan posisi mereka di Kaukasus Selatan pada tahun 2000 hingga 2008. Pada saat itu, kekuatan militer Turki yang merupakan langkah dari kebijakan luar negeri mereka sangat terasa di wilayah tersebut. Berkat adanya tindakan itu, Turki dinilai bukan lagi sebagai negara yang sulit, namun berubah menjadi negara yang mengancam (Isachenko 2020).

Dibentuknya organisasi yang bisa menggagas mediasi kedua negara untuk berdamai yakni *Organization for Security and Co-operation in Europe* atau OSCE Minsk Group. Organisasi tersebut diharap bisa mencari solusi dan juga sebagai mediator dengan membuat pertemuan rutin yang mempertemukan masing masing negara agar mencapai titik damai (Jafarova 2015). Akan tetapi bukan hal yang mudah untuk mendamaikan Armenia dan Azerbaijan, meski sudah melakukan upaya mediasi namun kedua negara tersebut masih melakukan kecurangan

gencatan senjata. Beberapa pelanggaran tersebut terjadi direntan tahun 2010 sampai 2016 ditemukan beberapa militer dari Armenia dan satu orang prajurit dari Azerbaijan tewas dengan luka tembak di Nagorno-Karabakh (Fuller's 2010).

Seiring dengan konflik yang masih berlanjut hingga sekarang dan dengan ikut sertanya negara di sekitar Nagorno-Karabakh hingga bahkan negara yang berada jauh dengan Armenia dan Azerbaijan pun turut ikut campur. Para aktor tersebut dapat dikategorikan menjadi dua, yakni aktor sekunder dan primer. Pada kasus ini aktor primer jelas yakni dua negara yang saling berperang untuk merebutkan satu wilayah Nagorno-Karabakh yaitu Armenia dan Azerbaijan. Sedangkan Turki, Rusia, Iran dan Amerika Serikat menjadi aktor sekunder dalam konflik ini. Bukan hanya aktor negara saja yang ikut meramaikan konflik ini namun juga terdapat beberapa organisasi internasional seperti Persatuan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, EPNK dan European Movement. Hadirnya aktor sekunder dalam kasus ini didasari oleh beberapa kepentingan mulai dari penyuplai persenjataan, hubungan sebagai untuk membentuk koalisi atau aliansi hingga ada yang memberikan sikap netral. Netral dalam artian tidak mendukung pihak siapapun atau manapun yang terlibat dalam konflik namun dapat berpartisipasi sebagai pihak yang melaksanakan mediasi untuk negara negara yang sedang berkonflik (Baumann 2015). Terdapat tiga indikasi pendukung dimana dalam konflik Armenia dan Azerbaijan ini mendapat bantuan dari aktor sekunder, diantaranya;

1. Iran sebagai negara pertama yang mendukung penuh kemenangan bagi Azerbaijan untuk mendapatkan wilayah Nagorno-Karabakh. Kesamaan agama, kedekatan hubungan politik yang sebelumnya terjalin hingga mayoritas penduduk Iran sendiri berasal dari etnis Azers suku asli dari

Azerbaijan. Namun kesungguhan Iran dalam membantu Azerbaijan kandas setelah Azerbaijan lebih memilih Turki dalam mengupayakan konflik ini.

2. Rusia disini melakukan kerjasama pada sektor persenjataan dimana Rusia menyuplai penuh senjata untuk kedua negara yang sedang berseteru yakni Azerbaijan dan Armenia. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi Rusia menjalin hubungan yang bisa dikatakan ambigu untuk kedua negara tersebut, faktor ini adalah ekonomis dan politis.
3. Turki secara terang terangan menyatakan dukungan kepada Azerbaijan. Turki membuat kebijakan untuk menutup jalur perbatasan dengan Armenia dan hal tersebut mengacaukan hubungan ekonomi dan perdagangan Armenia dengan negara disekitarnya. Kebijakan tersebut sudah menjadi bukti kuat bahwa Turki mendukung Azerbaijan (Baumann 2015).

Gambar 1. 1. Peta Geografis Armenia dan Azerbaijan



Sumber: (Reuters Graphics 2023).

Permasalahan wilayah Nagorno-Karabakh mencapai titik ketika Armenia dan Azerbaijan ini sudah menyepakati perjanjian damai dimana kesepakatan tersebut akhirnya dilanggar oleh kedua negara secara bersamaan. Turki sebagai aktor sekunder dan partner dari Azerbaijan pun harus memberikan peringatan kepada Armenia jika mereka berusaha untuk memulai konflik terlebih dahulu di wilayah Kaukasus Selatan maka Armenia akan mendapat kecaman serta perlawanan balik. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Mevlut Cavusoglu yang saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dari Turki. Segala bentuk kemungkinan buruk yang bisa terjadi di Kaukasus Selatan menjadi fokus utama bagi Turki demi meminimalisir terjadinya konflik dan juga dari pihak Azerbaijan pun tidak segan untuk mengerahkan seluruh kekuatan militer dan persenjataan lengkap jika suatu saat Armenia memulai peperangan terlebih dulu. Pada akhirnya konflik pun pecah pada bulan September 2020 tepat di Nagorno-Karabakh dimana Armenia dan Azerbaijan melakukan peperangan dengan bantuan sekutu mereka masing-masing (Lisbet 2020).

Setelah berfokus pada wilayah disekitar Mediterania Timur dan Suriah, Turki beralih ke Nagorno-Karabakh yang sudah berubah menjadi sorotan konflik oleh masyarakat internasional pada saat beberapa kompetisi regional serta global yang terjadi secara bersamaan. Sebenarnya terdapat ancaman dari Uni Eropa dengan melarang keikutsertaan Turki dalam konflik antara Armenia dan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh. Hal tersebut dikarenakan Turki bisa mengancam wilayah Armenia yang lain dimana kawasan tersebut lebih besar daripada Nagorno-Karabakh. Dewan Keamanan PBB bersama dengan Uni Eropa yang melarang Turki pada tahun 1990. Akan tetapi, PBB dan Uni Eropa tidak bisa langsung

menghentikan Turki karena harus berlandaskan pada persyaratan hukum yang berlaku terutama hukum internasional (Isachenko 2020).

2.2 Politik Luar Negeri Turki di Armenia dan Azerbaijan

Turki membuat langkah baru dalam kebijakan luar negeri untuk mengatasi permasalahan wilayah yang dekat dengan kawasan Turki. Ada beberapa faktor dari kebijakan baru Turki yakni reformasi, demokratisasi, pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya Partai AK dimana partai tersebut merupakan partai pengusung dari presiden Turki saat ini yakni Erdogan. Partai AK membuat Turki bisa masuk lebih dalam dan serta turut ikut andil dalam organisasi Uni Eropa. Dengan begitu maka Turki sangat leluasa untuk menempatkan posisi pada tatanan internasional dengan mengedepankan aspek-aspek seperti kerja sama, rasa saling membutuhkan, perekonomian, energi, stabilitas keamanan, perdamaian, kebijakan hubungan bilateral yang bersifat proaktif serta integrasi kawasan regional. Setelah melalui rombakan politik luar negeri, Turki mengalami sebuah proses yakni “De-Sekuritisasi” dimana terdapat beberapa cara pandang untuk melihat suatu isu keamanan salah satunya adanya wacana politik. Hal tersebut berakibat berubahnya cara pandang Turki tentang isu keamanan, ancaman dari eksternal maupun persaingan di ranah yang sama. Perubahan cara pandang ini juga mengubah cara pandang kebijakan luar negeri Turki dalam menangani konflik di Kaukasus Selatan dimana Turki menemukan indikasi bahwa kawasan tersebut memiliki pengaruh dan ladang peluang (Akpınar 2011).

Turki yang mengadopsi prinsip “*Zero Problems With Neighbours*” merupakan sebuah prinsip yang diusung oleh Turki sebagai ideologi kebijakan luar negeri pada awal 2000-an. Kebijakan ini berfokus pada kerja sama dialog serta membangun kepercayaan dengan negara di sekitar Turki. Prinsip ini juga mementingkan untuk meminimalisir serta menekan adanya masalah pada hubungan Turki dengan negara tetangganya. *Zero Problems With Neighbours* ini menjadi ciri khas dari politik luar negeri Turki yang selalu melekat. Dari kebijakan ini terdapat beberapa penawaran solusi untuk permasalahan yang dapat menimbulkan konflik atau peperangan hingga mampu menawarkan hasil final secara politis. Namun prinsip ini juga memiliki beberapa kritikan terkait dengan aplikasi serta efektifitasnya. Kritikan tersebut hadir ketika Turki memiliki hubungan yang kurang baik dengan beberapa negara di sekitarnya pada beberapa dekade terakhir (Walker 2011).

Prinsip *Zero Problems With Neighbours* ini diterapkan oleh Turki dalam permasalahan keamanan di Kaukasus Selatan didasari oleh kawasan itu menyimpan begitu banyak energi penting seperti gas dan cadangan minyak. Turki melihat tersebut sebagai sebuah sektor yang bisa diandalkan karena terintegrasi dengan perekonomian dunia. Akan tetapi, Turki tidak hanya melihat hal tersebut hanya menguntungkan dalam sektor ekonomi namun juga bisa sebagai jasa pelayanan perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut karena nantinya akan ada ketergantungan kerja sama dan ekonomi negara negara yang masih menggunakan sumber daya alam sebagai energi (Akpınar 2011).

Akan tetapi Turki sudah meninggalkan prinsip “*Zero Problems With Neighbours*” karena dinilai masih belum mampu untuk menginterpretasikan

kebijakan luar negerinya. Turki berganti pada sebuah konsep kebijakan luar negeri yang bernama “*Moral Realism*” dimana konsep ini memiliki penekanan kepada moralitas dan adanya pengakuan bahwa realita politik internasional itu sangat penting. *Moral Realism* juga memberikan definisi sebagai salah satu kebijakan politik luar negeri yang bersifat proaktif, tegas dan tepat dilain sisi kebijakan ini juga menjunjung sifat demokratis dan tidak agresif yang dimana jika sebuah negara mengusung politik luar negeri yang agresif hanya akan berpatokan pada negara yang kuat dan lemah, terlalu banyak kesenjangan dimana hal tersebut mengakibatkan konflik yang tak kunjung selesai. Turki sangat menekankan pada nilai-nilai moral sebagai promosi dari kebijakan luar negeri Turki yang baru ini (Keyman 2017).

Prinsip “*Zero Problems With Neighbours*” resmi berakhir di tahun 2015 dan Menteri Luar Negeri Turki yang menjabat pada saat itu yakni Ahmet Davutoglu akan membuat suatu kebijakan baru dengan mengupayakan untuk mengembalikan teman lama dan menjalin hubungan dengan teman baru. Pada tahun 2017 hal ini dapat dilihat dengan Turki yang berhasil menjalin hubungan politik dengan Rusia. Pada hubungan politik ini Turki bersama Rusia berhasil melakukan perlawanan kepada ISIS serta membendung konflik yang terjadi di Suriah (Keyman 2017).

Terdapat satu poin penting dari *Moral Realism* setelah prinsip tersebut digagas yaitu Turki membuat kebijakan yang berfokus penguatan norma-norma kemanusiaan dalam sistem tata kelola internasional yang demokratis. Semakin berkembangnya permasalahan yang terjadi di dunia, hal tersebut juga mengakibatkan sebuah tantangan yang baru pada sistem keamanan dunia dan mendorong negara untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Turki

menyadari hal tersebut oleh karena itu kekuatan internal dan eksternal sebuah negara dibutuhkan untuk mencapai perdamaian kemanusiaan. Semakin lama, Turki juga semakin terlibat pada bantuan kemanusiaan yang tersebar di seluruh dunia. Maka dari itu Turki semakin mudah untuk memperkenalkan kebijakan barunya yakni *Moral Realism* keseluruh dunia karena berhasil menekankan norma-norma berlandaskan kemanusiaan serta menjunjung tinggi demokrasi (Keyman 2017).

Negara yang tersebar di sekitar Kaukasus Selatan menyadari bahwa isu keamanan di wilayah mereka sangat rentan dengan adanya pasokan sumber daya energi maka dari itu pentingnya untuk menjaga serta menggunakan komoditas tersebut dengan bijak dan diiringi oleh integritas politik yang relevan agar mampu bersaing dengan ekonomi dunia. Hadirnya Turki di persoalan ini dengan menjanjikan dua faktor sebelumnya seiring dengan *power* mereka di keanggotaan Uni Eropa serta pengaruhnya yang semakin kuat juga di ranah internasional semakin membuat negara negara Kaukasus Selatan terlebihnya Azerbaijan sangat mempercayai Turki. Mengembangkan kerjasama militer, keamanan nasional, mempererat hubungan dengan warga sipil dan sistem demokrasi merupakan langkah berani dari Turki agar menciptakan citra pada politik luar negeri guna menarik negara lain agar menciptakan rasa saling membutuhkan, stabilitas dan perdamaian. Selain mendekatkan pengaruhnya di wilayah negara Barat, Turki sangat membutuhkan hubungan dengan negara Timur walaupun banyak menuai kritikan dimana Turki menjalin kebijakan aktif dengan negara Islam seperti Timur Tengah ditengarai hanya sebuah alibi saja (Akpınar 2011).

Kebijakan politik luar negeri Turki di Kaukasus Selatan memiliki tujuan agar tercapainya perkembangan hubungan ekonomi serta politik guna terciptanya

sebuah mekanisme yang stabil, damai serta makmur pada sektor keamanan geopolitik. Beberapa langkah baru digagas oleh Turki sebagai cerminan politik luar negeri dengan sistem baru atau yang bisa disebut multidimensi. Turki ingin menghilangkan klaim sebagai sebuah negara “transit” akan tetapi Turki ingin menjadi negara “sentral”. Maka dari itu Turki sangat sibuk untuk mendeklarasikan kebijakan politik luar negerinya dengan negara negara di dunia terlebih di wilayah Kaukasus Selatan (Akpınar 2011).

TIKA atau Lembaga Kerjasama dan Pembangunan Internasional merupakan sebuah substansi politik Turki yang berperan aktif dalam menjalankan kebijakan politik luar negeri terutama di wilayah Kaukasus Selatan dan sekitarnya. Data mengatakan lebih dari 44% anggaran dana dari TIKA digunakan untuk menyebarkan kebijakan ini di Timur Tengah dan Kaukasus Selatan (Akpınar 2011).

Beberapa anggaran tersebut digunakan untuk membantu beberapa wilayah di Kaukasus Selatan dalam berbagai sektor mulai dari industri, ekonomi, kesehatan, hubungan bisnis hingga sektor pendidikan dan program magang untuk mahasiswa di wilayah tersebut. Selain TIKA yang bergerak untuk meimplementasikan politik luar negeri Turki ada beberapa organisasi dari Turki yang lain seperti Federasi Pengusaha dan Industri yang menjadi wadah disektor hubungan perdagangan bagi Turki dan negara di Eurasia. Hal ini bertujuan untuk menjadikan wilayah Mediterania, Laut Hitam hingga Laut Kaspia sebagai perdagangan bebas (Akpınar 2011).

Bukan rahasia umum lagi jika Turki menjalin hubungan bilateral yang baik dengan Azerbaijan namun memusuhi Armenia. Turki membantu Azerbaijan dengan menyuplai pasokan kekuatan yang cukup terbilang banyak meliputi militer,

ekonomi serta logistik (Keddie 2020). Turki juga mengubah stigma masyarakat dunia untuk mendukung Azerbaijan dalam konflik di Nagorno-Karabakh (Khairunisa 2022).

Armenia sama sekali tidak pernah menjalin hubungan diplomatik dengan Turki. Akan tetapi Turki meyakini jika hanya Azerbaijan dan Armenia itu sendiri yang bisa menyelesaikan konflik yang sedang terjadi di Nagorno-Karabakh ini (Al Jazeera 2023). Terdapat beberapa alasan mengapa Turki enggan untuk berhubungan baik dengan Armenia, alasannya dapat dikategorikan dengan tiga faktor antara lain :

1. Regional, Turki sangat bergantung pada sumber daya alam milik Rusia yang dimana Rusia memiliki hubungan baik dengan Armenia. Maka dari itu Turki lebih memilih menjalin hubungan bilateral dengan Azerbaijan karena meminimalisir potensi intervensi dan pengaruh dari Rusia atau Armenia itu sendiri.
2. Politik, sebelumnya Turki sudah berjanji pada Azerbaijan untuk saling mendukung pada saat perundingan atau saat peperangan. Dengan demikian, untuk mendukung kesungguhan itu Turki menutup seluruh akses perbatasannya dengan Armenia pada tahun 1993.
3. Sejarah, ini yang menjadi alasan kuat mengapa Turki menghindari adanya kontak hubungan dengan Armenia. Pada abad ke 20 Turki dituduh melakukan pengusiran dan pembantaian massal terhadap masyarakat Turki saat Kekaisaran Ottoman masih berkuasa di Turki (Keddie 2020).

Sebenarnya sudah ada upaya dari kedua negara tersebut untuk membangun hubungan bilateral dan melupakan luka pada masa lalu. Akan tetapi, hal tersebut sangat sulit dilakukan ditambahkan peperangan yang terjadi di Ukraina terjadi menambah kesulitan bagi kedua negara (Giragosian 2022).

Pada beberapa tahun ini politik luar negeri yang diambil Turki dalam konflik Armenia dan Azerbaijan menjadi salah satu topik yang panas. Dengan menunjuk Azerbaijan menjadi teman politik dan Armenia menjadi musuh politik dimana kedua negara mendapat perhatian dari Turki sebagai aktor regional utama (Al Jazeera 2023). Karena Azerbaijan mendapatkan dukungan Turki hal tersebut mengakibatkan adanya ketegangan dari negara anggota NATO. Maka dari itu lah Turki diminta agar menerapkan kebijakan luar negeri yang pasif karena sebelumnya Turki sangat agresif dalam sektor militer serta mendukung adanya gencatan senjata di wilayah peperangan (Gramer and Detsch 2020). Turki sangat memberikan peran penting karena menyuplai peralatan militer dan pesawat tempur yang dikirim langsung dari Ankara ke Azerbaijan (Al Jazeera 2023).

Sebenarnya ada beberapa kejadian yang bisa menciptakan hubungan antara Armenia dan Turki. Dimana pada tahun 2009, Turki serta Armenia membuat perjanjian bilateral yang dikenal dengan Protokol Zurich. Perjanjian ini dibuat atas dasar untuk memulihkan hubungan politik kedua negara ini. Diharapkan mampu menjadi sebuah alat dari kebijakan luar negeri efektif yang bisa normalisasi hubungan bilateral Armenia dan Azerbaijan. Pada sejarahnya, Turki mempunyai garis kemajuan dan masih melekat pada kehidupan bersosial masyarakat Turki yang diwariskan oleh budaya Armenia. Beberapa warisan berbentuk bangunan seperti Gereja Armenia Katolik di daerah Diyarbakir dan Ordu, Gereja Akdamar hingga

rumah Armenia yang bersejarah di Beykoz merupakan satu contoh warisan budaya Armenia yang masih terjaga di negara Turki (Akpınar 2011).

Akan tetapi bukan hal yang mudah bagi kedua negara menjalin hubungan mesra dengan waktu yang lama. Hal ini terjadi karena Armenia menuduh bahwa Turki menjalin hubungan dengan Armenia hanya untuk kepentingan negaranya sendiri serta mengkhianati Armenia karena lebih mementingkan Azerbaijan. Tekanan tersebut bukan hanya datang dari pihak Armenia namun warga Turki dan Azerbaijan pun ikut mengancam jalinan hubungan Turki dengan Armenia ini. Warga Turki beranggapan bahwa adanya perjanjian itu tidak memiliki transparansi untuk mendamaikan konflik yang terjadi di Nagorno-Karabakh dan hanya memperkeruh keadaan. Tanggapan negatif juga datang dari Azerbaijan untuk memaksa Turki agar tidak melanjutkan hubungan bilateralnya dengan Armenia serta menghapus protokol yang sebelumnya sudah disepakati (Akpınar 2011). Setelah bertahun-tahun perjanjian tersebut tidak memiliki titik temu, akhirnya pada 1 Maret 2018, protokol tersebut resmi dicabut oleh Dewan Keamanan Armenia (Mkrtchyan 2018).

Semakin Turki terlibat dalam hubungan dengan negara lain, proses mediasi konflik dan kejadian yang bersinggungan dengan keamanan. Turki menyadari bahwasannya stabilitas dan keamanan suatu wilayah hanya beririsan dengan benang tipis. Begitu banyak konsekuensi bila suatu kebijakan dilakukan dengan kurang tepat serta gegabah pada saat mengambil keputusan jika terjadi suatu ancaman. Turki seringkali mengalami posisi yang menjebak terutama di antara dua negara besar yakni Amerika Serikat dan Rusia. Akan tetapi, Turki mampu keluar dari masalah tersebut dan kembali menguatkan pondasi politik berdasarkan kepercayaan diri dan prinsip. Trans-Atlantik merupakan sebuah identitas yang

dipertahankan oleh Turki dalam mengambil kebijakan luar negeri serta mengupayakan mengambil kebijakan yang mengutamakan karakter dari regionalnya (Akpınar 2011).

Turki menggunakan multiseluler sebagai pendekatan dalam menjalin hubungan politik internasionalnya. Lebih memprioritaskan mediasi serta perundingan politik yang meliputi beberapa sektor kerjasama serta menerapkan strategi dalam memperkuat integrasi dalam kerjasama internasional. Dengan demikian, Turki berhasil menjadi aktor kunci dalam konflik di Kaukasus Selatan dan Turki bergerak sebagai negara penting dalam pengambilan kebijakan atau inisiatif penyelesaian konflik (Akpınar 2011).

BAB 3

Analisis Defensif Realisme terkait dengan keterlibatan Turki dalam Konflik di Nagorno-Karabakh

Pada penelitian penulis menggunakan teori defensif realisme dalam mengetahui mengapa Turki terlibat konflik antara Armenia dan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh pada tahun 2020 hingga 2022. Dijelaskan jika defensif realisme sangat membatasi suatu negara melakukan ekspansi yang cenderung agresif dan mengganggu suatu negara dalam mematuhi sistem keseimbangan kekuatan. Sehingga defensif realisme menuntut negara agar lebih fokus dalam sektor pertahanan dan tidak memaksakan membuat gagasan agresif yang akan

menimbulkan konflik atau peperangan. Teori tersebut sangat sejalan dengan kebijakan luar negeri yang diadopsi oleh Turki yakni Moral Realism, dimana dalam moral realism Turki sangat menonjolkan sifat demokratis dan kebijakan yang tidak agresif. Defensif realisme dan moral realisme sebagai konsep utama yang diadopsi oleh politik luar negeri Turki memiliki kesamaan yakni menjunjung tinggi sifat proaktif, tegas, tepat dan menyamaratakan semua negara yang lemah maupun kuat sehingga tidak menimbulkan adanya rasa ketimpangan bagi semua negara yang terlibat suatu konflik. Dukungan yang diambil oleh Turki dimana cenderung mendukung Azerbaijan ini akibat dari adanya pergeseran konsep luar negeri yang terdahulu, digantikan dengan moral realisme yang dinilai lebih eksplisit untuk meninjau perselisihan terhadap negara yang berada disekitar Turki.

Hadirnya Turki dalam mendukung Azerbaijan dari tahun ke tahun mengalami perkembangan dan semakin terbuka serta berani. Walaupun memberi dukungan, namun Turki tidak mau sembarangan memberikan semua dukungan terlebih dukungan militer kepada Azerbaijan. Hal tersebut terindikasi pada perang kedua yang terjadi di Nagorno-Karabakh pada september 2020. Atas izin dari Presiden Turki yakni Erdogan, Turki akhirnya mau memberikan pasokan militer kepada Azerbaijan selama konflik tersebut berlangsung karena militer Azerbaijan tidak mampu untuk menandingi pasukan dari Armenia. Sebenarnya Turki sudah memperingatkan Armenia agar tidak memprovokasi Azerbaijan. Menteri Luar Negeri dari Turki yakni Mevlut Cavusoglu secara terang-terangan memberikan isyarat agar Armenia menahan diri untuk melakukan provokasi baru yang akan menyulut Azerbaijan. Peperangan berakhir setelah kehadiran Rusia di tengah-

tengah konflik dengan bantuan penjaga perdamaian (Council on Foreign Relations 2023).

Selama terjadinya konflik ditahun 2020 hingga 2022, Nagorno-Karabakh tetap menjadi titik utama sebagai wilayah yang diperebutkan. Pada Mei 2021 terjadi pelanggaran perjanjian dimana tertara Azerbaijan terindikasi melewati batas wilayah Armenia yakni provinsi Gegharkunik dan Syunik hingga menduduki sekitar lebih dari 200 kilometer wilayah dari Armenia tersebut. Karena kejadian tersebut, banyak warga sipil disekitaran wilayah tersebut dan para anggota militer menjadi korban. Berkat adanya kejadian itu, Azerbaijan semakin menunjukkan bahwa kekuasaan mereka semakin besar dan kuat. Azerbaijan memiliki kekuatan militer serta strategi yang jauh mengalami peningkatan (Roth 2021). Berkat dukungan, bantuan serta pelatihan militer yang diberikan oleh Turki, Azerbaijan berhasil berubah menjadi negara yang disegani baik oleh sekutu dan musuh.

Ditahun 2022, presiden Turki yakni Recep Tayyip Erdogan menyatakan mendukung Azerbaijan untuk mengamankan keutuhan wilayah mereka dan memberikan bantuan pelatihan militer meliputi kendaraan tempur, persenjataan dan drone. Walaupun Turki menyatakan secara terang-terangan mendukung Azerbaijan, namun Turki juga menyatakan bahwa mereka tidak ingin terlalu terlibat secara langsung dalam konflik (Reuters 2023). Secara tidak langsung, Turki sudah mengimplementasikan defensif realisme dan moral realisme. Dimana Turki sangat amat mempertimbangkan keterlibatan mereka dalam konflik yang terjadi di Nagorno-Karabakh pada tahun 2020 hingga 2022. Bukan hal yang mudah untuk mengesahkan dan menyetujui bantuan militer karena terdapat berbagai resiko yang mengintai.

Dalam kasus ini Turki juga terindikasi membantu Azerbaijan dikarenakan ada rasa peduli kepada negara yang dimana Azerbaijan ditengarai menjadi lemah dalam konflik di Nagorno-Karabakh seiring dengan adanya kehadiran Rusia, Amerika Serikat dan Prancis yang mendukung Armenia pada tahun 2020. Bukan hanya bantuan militer namun Turki mempunyai keinginan untuk melakukan konsolidasi posisi mereka sebagai aktor regional dengan ikut serta pada proses mediasi pada konflik ini (Isachenko 2020).

3.1 Faktor Internal

3.1.1 Bentuk Kepemimpinan

Dalam faktor ini yang dimaksud bentuk kepemimpinan adalah pengaruh dari andil Erdogan dalam konflik Nagorno-Karabakh ini. Turki mempunyai ambisi yang besar untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berkonflik dengan cara dan sistem politik yang dianut oleh Turki sendiri. Adanya campur tangan Erdogan dalam keterlibatan negaranya pada konflik di Nagorno-Karabakh inilah yang menjadi poin penting dalam faktor ini. Atas izin Erdogan, pada tahun 2020 lalu pasukan militer Turki berangkat ke wilayah konflik untuk menjadi pasukan perdamaian guna memantau keberhasilan gencatan senjata yang sedang dilakukan oleh Armenia dan Azerbaijan. Namun belum ada data yang pasti berapa jumlah pasti pasukan Turki yang dikirim untuk misi tersebut. Akan tetapi, hal tersebut memperkuat bukti bahwa Erdogan memiliki pengaruh yang sangat besar (Adzkie and Riyanto 2021).

Selain itu, Erdogan sebagai Presiden Turki juga memainkan peranan penting dalam konflik ini. Bahkan Erdogan sempat menuai tuduhan jika ia telah memasok persenjataan ke Azerbaijan selama peperangan yang terjadi pada 2020

lalu. Tuduhan ini muncul setelah Erdogan memberikan statement bahwa operasi yang dilakukan oleh Azerbaijan itu berjalan sangat baik untuk mempertahankan posisinya dan juga membebaskan wilayah Nagorno-Karabakh dari belenggu konflik (Keddie 2020). Pernyataan dari Erdogan ini membuat Turki secara tidak langsung mempunyai perbedaan pendapat dengan mayoritas negara besar lain hingga membuat negara yang tergabung dalam NATO cemas dan meminta adanya upaya gencatan senjata bagi Armenia dan Azerbaijan. Adanya dukungan dari Turki kepada Azerbaijan terindikasi sebagai usaha guna meraih pengaruh penuh di kawasan tersebut (Coskun 2020). Walaupun secara terang-terangan memihak Azerbaijan, namun Erdogan juga menyatakan ketertarikannya untuk menjalin hubungan baik dengan Armenia dan ikut serta dalam proses mediasi bersama Nikol Pashinyan selaku Perdana Menteri Armenia (Kayaoglu 2023). Dengan begitu, Erdogan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam konflik yang terjadi antara Azerbaijan dan Armenia. Mendukung kegiatan militer yang dilakukan oleh Azerbaijan dan ikut serta dalam proses negosiasi baik dengan Azerbaijan ataupun Armenia ini dinilai menjadi usaha Erdogan untuk bisa menggapai pengaruh di kawasan Nagorno-Karabakh.

3.1.2 Bentuk Politik Luar Negeri

Terdapat beberapa kebijakan politik luar negeri yang digagas oleh Turki dalam menangani permasalahan pada negara sekitarnya. Pada saat kepemimpinan Mustofa Kemal Ataturk yakni presiden pertama Turki, merancang sebuah gagasan politik luar negeri dengan berjudulkan “Peace at Home, Peace Abroad”. Dibuatnya gagasan politik tersebut dengan maksud untuk mewujudkan perdamaian serta keadilan dunia dan didukung dengan adanya konsep hukum yang bersifat konsisten.

Kebijakan tersebut mengalami perkembangan setelah masa kepemimpinan Erdogan sebagai presiden Turki saat ini. Kebijakan luar negeri Turki saat ini terlebih dalam keterlibatan Turki pada konflik Nagorno-Karabakh sangat menjunjung tinggi nilai-nilai islam. Hal tersebut terjadi dikarenakan Presiden Erdogan merupakan seorang yang sangat agamis serta memiliki kecenderungan untuk membuat suatu kebijakan atas dasar nilai nilai islam (Adzkia and Riyanto 2021).

Politik luar negeri yang digagas oleh Turki sangat mengimplementasikan negaranya pada konflik di Nagorno-Karabakh yang memiliki aspek penting seperti peran dan tujuan yang jelas (Adzkia and Riyanto 2021). Kebijakan luar negeri untuk konflik ini yang digagas Turki dan langsung diberikan oleh presiden Tayyip Erdogan yakni dengan langsung memberikan perintah kepada OSCE Minsk agar segera menyelesaikan peperangan yang terjadi teruma pada konflik yang berlangsung selama 44 hari pada November 2020. Langkah yang diambil oleh Turki pun berhasil dimana diwaktu yang sama Azerbaijan mau untuk melepas beberapa kota yang mereka jaga dan membebaskan kurang lebih 300 warga di desa sekitar konflik dimana mayoritas dari warga tersebut merupakan etnis dari Armenia (Abisatya 2022). Hal ini bisa dilihat dari dua kebijakan politik yang dianut oleh Turki yakni *Zero Problems With Neighbours* serta Moral Realisme yang memiliki kesamaan yakni mengedepankan politik luar negeri yang tegas, jelas, proaktif serta menjunjung tinggi demokrasi. Keterlibatan Turki dalam hubungan bilateral dengan negara lain baik yang sedang berkonflik ataupun tidak, Turki memilih untuk tidak agresif dan sangat menghindari peperangan.

3.2 Faktor Eksternal

3.2.1 Kerjasama Internasional

Turki dan Azerbaijan telah lama menjalin hubungan di sektor ekonomi dengan membuat berbagai kerjasama proyek seperti infrastruktur dan pengembangan sumber daya alam. Pipa Kaukasus Selatan, Baku Tbilisi Ceyhan, kereta api Kars Tbilisi Baku dan perencanaan pembangunan pipa gas alam Trans Anatolian merupakan sebagian kecil contoh hubungan ekonomi yang sudah terjalin antara kedua negara ini. Pada beberapa dekade terakhir, Azerbaijan juga menerima dukungan serta bantuan militer dari Turki dengan skala yang cukup besar. Peralatan militer dan pesawat tempur menjadi komoditas yang diberikan Turki kepada Azerbaijan selama konflik di kawasan Nagorno-Karabakh berlangsung. Jika dilihat melalui sejarahnya, kerjasama antara Turki dan Azerbaijan terlebih pada sektor militer sudah terjadi sejak lama. Melalui beberapa perjanjian yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak sejak 1992 dimulai dari latihan serta pendidikan militer bersama, pelatihan teknis dan ilmiah, kerjasama bantuan dan strategi timbal balik hingga deklarasi hubungan sekutu menjadikan Turki dan Azerbaijan sebagai partner yang sangat dekat (Abdad 2022).

Dalam sektor ekonomi kedua negara sudah melakukan negosiasi dalam ekspor dan impor gas alam milik Azerbaijan yang dibarengi dengan proyek infrastruktur. Seiring dengan kebijakan luar negeri yang digagas oleh Turki, Turki mempunyai keinginan untuk mencapai keamanan pada wilayah yang berada disekitarnya. Maka dari itu, Turki berusaha untuk memastikan bahwa sumber daya energi yang dimiliki oleh Azerbaijan dan Nagorno-Karabakh berada dalam kondisi yang aman (Adzkie and Riyanto 2021).

Keterlibatan Turki dalam konflik yang terjadi di kawasan Nagorno-Karabakh, secara tidak langsung Turki ingin menunjukkan bahwa posisi mereka pada konflik itu sangat penting. Terlebih keinginan Turki untuk menjaga kawasan pusat konflik yakni Karabakh yang dinilai begitu strategis dengan menyimpan banyak komoditas energi alam didalamnya. Tentara Azerbaijan yang dilatih dan dibantu dengan persenjataan lengkap oleh militer Turki hingga di beberapa kejadian perwira militer Turki mendapat tuduhan dimana telah terlibat dalam serangan yang menggunakan pesawat tanpa awak dan menunjukkan peran penting pada kejadian tersebut. Keberhasilan kerjasama yang dilakukan oleh Azerbaijan dan Turki ini sudah dianggap sebagai indikasi kemenangan bagi Azerbaijan (Adzkie and Riyanto 2021).

3.2.2 Kedekatan Hubungan

Jika berbicara tentang kedekatan antara Turki dan Azerbaijan, maka kita harus melihat kembali sejarah dimana Turki adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Azerbaijan yang merdeka setelah kehancuran Uni Soviet pada tahun 1991. Duta Besar Azerbaijan yakni Rashad Mammadov menyampaikan jika hubungan yang terjalin antara Azerbaijan dan Turki seperti layaknya hubungan saudara dan tidak bisa dibandingkan dengan hubungan negara lain. Kesamaan etnis, budaya dan sejarah membuat Azerbaijan dan Turki mendapat julukan “dua negara dengan satu bangsa”. Hubungan yang terjalin antara Azerbaijan dan Turki ini bisa dikategorikan sebagai hubungan yang strategis, hal ini bisa dikatakan karena mereka saling menjunjung tinggi rasa saling hormat. Azerbaijan dan Turki saling berkunjung ke negara masing masing karena untuk memunculkan rasa saling percaya dan membutuhkan. Sebenarnya terdapat satu fakta yang menuai banyak

dilema ditengah hubungan baik antara Azerbaijan dan Turki ini, yakni Turki yang sejak lama begitu menikmati pasokan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Azerbaijan seperti gas alam dan minyak bumi. Adanya rasa saling tidak suka kepada Armenia juga membuat kedekatan ini semakin hari semakin erat terjalin. Azerbaijan yang mempunyai masalah perebutan wilayah dengan Armenia sedangkan Turki yang mendapatkan memori buruk akan kejadian mendeportasi etnis Armenia pada saat kepemimpinan Kesultanan Utsmaniyah lebih dari satu abad lalu. Namun Turki terus membantah tuduhan tersebut sebagai peristiwa genosida (Adzkia and Riyanto 2021).

Persamaan agama juga yang membuat Azerbaijan dan Turki memiliki keharmonisan dalam menjalin hubungan. Kedua negara ini memiliki mayoritas penganut agama Islam meski terdapat 2 aliran yang berbeda. Turki yang berlandaskan Islam Sunni sedangkan Azerbaijan berlandaskan pada Islam Syiah. Akan tetapi proses penyebaran agama Islam di Azerbaijan tidak lepas dari campur tangan oleh para ulama-ulama Sunni Turki selama Kekaisaran Usmani sekitar tahun 1299 dan disusul dengan berkembangnya ajaran Islam Syiah pada Dinasti Safawiyah ditahun 1501. Dengan hadirnya dua aliran Islam yakni Sunni dan Syiah secara damai, membuat agama Islam sangat mudah diterima oleh masyarakat Azerbaijan. Ditambah lagi ketika Uni Soviet sedang gencar-gencarnya untuk menyuarakan gerakan anti-agama yang dinilai terlalu keras oleh masyarakat, maka Islam Turki sudah mendapat tempat dihati masyarakat Azerbaijan pada saat itu. Walaupun aliran Islam Syiah bergitu sangat mendominasi di Azerbaijan namun pemerintah Azerbaijan mendirikan satu lembaga yaitu *State Committee for Work with Religious Organizations* atau SCRWO dimana lembaga tersebut bertugas

untuk mengatur dan mengawasi penyebaran ajaran agama yang berasal dari negara luar termasuk juga yang berasal dari Turki. Hal tersebut membuat terciptanya rasa aman, nyaman dan toleransi antara umat beragama yang berasal dari luar Azerbaijan dan terbentuknya stigma masyarakat Azerbaijan yang menganggap ajaran Islam Turki tidak mengancam kesatuan negaranya (Abisatya 2022).

3.2.3 Ketergantungan Ekonomi

Wilayah yang bernama Tovuz, salah satu bagian dari Azerbaijan dimana terjadi peperangan pada Juli 2020 dan juga memicu konflik selama 44 hari dibulan September setelahnya. Wilayah Tovuz sendiri merupakan suatu kawasan yang sangat vital bagi Turki karena terdapat setidaknya tiga aliran pipa sumber daya gas alam yang saling menghubungkan antara Azerbaijan dan Turki. Ketiga pipa tersebut antara lain TANAP atau *Trans Anatolian Natural Gas Pipeline*, SCP atau *South Caucasus Pipeline* dan TAP atau *Trans Adriatic Pipeline*. Aliran pipa gas alam itu menjadi salah satu penghubung gas dan minyak dari Azerbaijan menuju Turki untuk disuplai ke negara-negara Eropa. Terdapat indikasi ancaman pada penyerangan yang terjadi pada 12 hingga 16 Juli 2020 dimana di wilayah perbatasan Tovuz terjadi serangan yang bersenjatakan senapan artileri oleh militer Armenia dan Azerbaijan. Maka dari itu Turki mendukung penuh Azerbaijan untuk bisa mendapatkan wilayah tersebut atas konflik yang terjadi dengan Armenia demi kelangsungan cadangan energi yang sebelumnya Turki kuasai. Bukan tanpa alasan mengapa Turki berusaha untuk mengamankan kawasan tersebut (Abisatya 2022).

Turki mengalami peningkatan atas penggunaan sumber daya energi alam terutama dari Azerbaijan. Lembaga pusat energi Turki yakni Energy Exchange Istanbul mengatakan bahwa pada tahun 2015-2019, Turki memasok energi sumber

daya alam berupa gas dan minyak dari Azerbaijan lebih besar ketimbang mengimpor gas dan minyak dari Rusia. Peningkatan sebesar 21% pada 2019 yang sebelumnya hanya berkisar 13% di 2015 sudah bisa menjawab bagaimana Turki sangat bergantung pada pasokan sumber daya alam milik Azerbaijan. Sebelumnya Turki juga sudah membuat kebijakan untuk lebih fokus untuk mengimpor gas dan minyak dari Azerbaijan daripada harus bergantung pada Rusia. Hal tersebut dikarenakan kurang baiknya hubungan diplomatik Turki dengan Rusia dikarenakan buruknya Turki dalam menjalin kerjasama dengan negara barat. Dengan kebijakan yang diambil oleh Turki untuk tidak bergantung pada pasokan sumber daya alam milik Rusia, maka secara tidak langsung Turki mampu terhindar dari belenggu Geopolitik Moskow dan juga Turki berusaha untuk bisa memposisikan diri untuk lebih berani bersaing disektor kepentingan politik dengan Rusia (Abisatya 2022).

3.2.4 Persaingan Antar Elit Politik

Hadirnya beberapa negara besar yang terlibat dalam konflik Nagorno-Karabakh ini semakin membuat upaya untuk mendamaikan kedua negara yang sedang berperang menjadi sangat rumit. Rusia, Iran dan Amerika Serikat yang sudah ikut terlibat dalam kasus konflik antara Armenia dan Azerbaijan ini. Banyak dari negara yang ikut terlibat sebelumnya menjadi negara anggota dari organisasi internasional seperti OSCE Minsk Group, PBB, European Movement hingga Uni Eropa. Beberapa negara lain yang ikut hadir ini masuk dalam klasifikasi aktor sekunder karena aktor utama dalam konflik ini adalah Armenia dan Azerbaijan sendiri (Baumann 2015).

Pada konflik ini Rusia-lah yang menjadi sorotan paling utama dalam keikutsertaannya. Dipimpin oleh Vladimir Putih, Rusia seakan menjadi aktor

raksasa dengan tujuan hingga bagaimana cara Rusia untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan mereka. Walaupun Rusia dikenal sebagai negara *hard power* akan tetapi beberapa kali Rusia sudah menggunakan sistem kerjasama yang *soft power*. Hal ini dilakukan untuk lebih menyebarkan pengaruh dan mengesampingkan kekuatan militer yang dulu lebih sering digunakan oleh Rusia. Sejak keruntuhan Uni Soviet dan munculnya beberapa negara dari pecahan Uni Soviet tersebut menjadi fokus utama bagi Rusia untuk mendapatkan kembali simpati dari negara-negara yang tersebar di wilayah Kaukasus Selatan (Kristiani 2013).

Bersama Turki, Rusia merupakan negara terkuat yang hadir pada konflik ini mempunyai ambisi dengan mengeluarkan kebijakan politik luar negeri yang memprioritaskan negara-negara pecahan dari Uni Soviet dan menjadikan negara-negara tersebut sebagai sekutu. Dengan berlandaskan kesamaan budaya serta jejak historis membuat Rusia dengan mudah memposisikan mereka sebagai mediator bagi negara-negara pecahan Uni Soviet. Konflik antara Armenia dan Azerbaijan yang sangat sulit untuk diselesaikan dan terus mengalami isu-isu negatif antara kedua negara membuat Rusia semakin memiliki peran penting dalam hal negosiasi yang berlandaskan pada aturan yang dibuat oleh Minsk Group (Kristiani 2013).

Rusia dan Turki telah terindikasi ikut serta dalam konflik yang terjadi pada bulan September 2020 atau yang dikenal dengan *September War* yang berlangsung selama 44 hari. Kedua negara ini memiliki kesamaan yakni kepentingan disektor geopolitik. Rusia mendukung Armenia di dasari dengan hubungan keamanan dan ekonomi yang kuat karena keduanya bergabung dengan sebuah organisasi yang bernama *Collective Security Treaty Organization* atau CSTO. Rusia dan Turki sama-sama menginginkan kekuasaan geopolitik yang sepenuhnya berada di

Kaukasus dimana konflik ini sedang berlangsung (Abisatya 2022). Hal tersebut secara tidak langsung membuat Turki mendapatkan tekanan dikarenakan terdapat negara atau elit lain yang berusaha ikut andil dalam konflik di Nagorno-Karabakh dimana negara atau elit tersebut juga memiliki motif yang sama yakni berusaha untuk mendapatkan kawasan tersebut.

3.2.5 Kebebasan Media

Peperangan yang terjadi di tahun 2020 lalu bukan hanya melibatkan militer yang bertarung untuk memperjuangkan wilayah Nagorno-Karabakh, namun di berbagai media sosial banyak yang menyinggung mengapa konflik ini semakin berlarut. Masyarakat sipil dan *public figure* juga ikut meramaikan hingga memberikan opini mereka terkait dengan konflik. Media cetak digital seperti CNN, BBC, Al Jazeera hingga TRT World yang sudah merambah ke media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter untuk menyampaikan isu terkait dengan konflik. Mereka dengan bebas menginformasikan konflik yang mendapat ratusan respon masyarakat dari seluruh dunia yang juga ikut tergiring dengan konten yang telah dibuat. Dimasa peperangan yang terjadi pada 2020 kemarin, Armenia dan Azerbaijan juga melakukan peperangan di media sosial terkait dengan konflik. Bagaimana keadaan selama peperangan terjadi dan situasi saat pertempuran menjadi fokus kedua negara agar menciptakan simpati bagi masyarakat dunia. Selain dari tokoh masyarakat atau para politikus dari Armenia dan Azerbaijan saja yang turut serta memberikan info terkait konflik ini, masyarakat sipil yang berasal dari kedua negara tersebut pun juga ikut dalam memberikan info terbaru. Dengan adanya kejadian tersebut banyak dari masyarakat dunia yang sebelumnya tidak

mengetahui secara detail tentang bagaimana situasi serta kondisi di medan pertempuran akhirnya bisa mengetahui dan memahami (Qarayeva 2021).

Banyak beredar rekaman yang direkam oleh warga setempat atau anggota militer dan rekaman dari *drone* yang tersebar luas di media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram. Banyak dari akun yang memposting juga menuliskan tulisan yang menggiring opini masyarakat untuk lebih memihak ke masing-masing negara. Bahkan Menteri Pertahanan dari Armenia dan Azerbaijan pun juga turut merayakan kejadian ini dengan saling mengunggah postingan terkait dengan peperangan yang terjadi hingga rekaman yang bisa dibilang cukup mengerikan di kanal *Youtube* mereka masing-masing. Kejadian saling menuduh siapa yang bersalah dan juga postingan berita palsu di sosial media sudah menjadi hal yang lumrah terjadi disaat pertempuran semakin memanas (Qarayeva 2021).

Bahkan Recep Tayyip Erdogan selaku presiden Turki pun ikut memberikan opini di media sosial Twitter pribadi dengan menunjukkan bahwa negaranya secara terang-terangan mendukung Azerbaijan dalam perang di Nagorno-Karabakh. Tweet dari presiden Erdogan ini mendapatkan ribuan komentar dan lebih dari 30 ribu *like*. Banyak dari komentar negatif diposting tersebut namun juga banyak kalangan yang merespon baik karena mengingat kedekatan antara Azerbaijan dan Turki serta sejarah yang baik. Atlet sepakbola yakni Mesut Ozil memilih untuk mendukung Azerbaijan dalam konflik ini. Ozil pada kanal Twitternya mengutip kata-kata dari mantan presiden Turki yakni Mustafa Kemal Ataturk. “Masalah Azerbaijan adalah masalah kita, kebahagiaan Azerbaijan adalah kebahagiaan kita juga. Satu negara, dua kebangsaan” ujar Ozil pada Twitternya (Qarayeva 2021).

Gambar 1.2 Twitter Mesut Ozil pada 14 Oktober 2020



Sumber : (Ozil 2020)

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dinamika konflik yang terjadi antara Armenia dan Azerbaijan yang terus mengalami perkembangan setiap saat karena ada faktor dari negara sekunder yang juga turut ikut serta diluar maupun didalam medan perang. Hegemoni Turki yang sangat besar dan memiliki posisi yang penting diwilayah Eropa Timur, mengakibatkan Turki bebas untuk melakukan apa yang menjadi target dari kebijakan luar negeri mereka. Turki berubah menjadi negara yang disegani oleh berbagai negara karena hal tersebutlah Azerbaijan sangat bergantung pada dukungan serta bantuan yang diberikan oleh Turki. Berbagai bantuan ditawarkan

oleh Turki seperti persenjataan, kendaraan perang, pasukan militer hingga bantuan non-militer pun diterima dengan baik oleh Azerbaijan. Oleh karena itu Azerbaijan selalu bisa mengimbangi kekuatan militer dari Armenia yang juga mendapat bantuan dari negara lain.

Berkaca pada yang telah dituliskan, dapat disimpulkan bahwa Turki sebenarnya mempunyai kepentingan untuk melindungi cadangan energi yang tersimpan di wilayah konflik yakni Baku dan jalur pipa gas alam yang terbentang di wilayah Tovuz menjadi fokus utama Turki untuk ikut terlibat langsung dalam konflik ini. Bantuan yang diberikan oleh Turki kepada Azerbaijan mengakibatkan posisi Turki yang sangat penting di Kaukasus Selatan. Slogan “Satu Negara, Dua Bangsa” menjadi bahan bakar semangat bagi Turki untuk terus memperjuangkan kemenangan Azerbaijan atas wilayah yang diperebutkan.

Dengan semakin tingginya permintaan sumber daya energi dari Azerbaijan, memaksa Turki untuk selalu memantau bagaimana keadaan serta kondisi yang terjadi di Nagorno-Karabakh. Disamping itu juga Turki yang sedang berusaha untuk bisa lepas dari ketergantungan mereka yang sebelumnya menjadikan Rusia sebagai partner dalam kerjasama impor gas dan minyak.

Azerbaijan menjalin hubungan dengan Turki karena berlandaskan pada sejarah masa lalu seperti budaya, bahasa dan agama berhasil membuat citra kerjasama kedua negara tersebut menjadi *soft diplomacy* atau kerjasama yang sangat menjunjung tinggi rasa sosial, demokrasi dan tidak agresif. Turki yang sejak dulu telah membuat kebijakan politik luar negeri dengan tujuan, orientasi, peran yang jelas serta proaktif namun tetap sangat berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan dan juga jarang menggunakan kekuatan militer disetiap permasalahan

yang mereka hadapi. “*Zero Problems with Neighbours*” dan “*Moral Realism*” berhasil menjadi contoh akurat dari kebijakan politik luar negeri yang sudah melekat pada identitas Turki.

Berdasarkan pada teori defensif realisme yang digagas oleh Kenneth Waltz, penulis menemukan banyak faktor pendorong yang relevan terkait dengan variable-variable yang sudah dijelaskan. Maka *output* yang dapat disimpulkan dari tulisan ini adalah Turki yang mempunyai sifat mengimbangi atau *balancing*. Sejalan dengan fokus dasar dari defensif realisme yakni *balance of power* dengan *Moral Realism* yang menjadi pendekatan politik luar negeri Turki dimana dalam pendekatan tersebut Turki sangat menjaga keseimbangan antara kekuatan militer dan etika kemanusiaan guna membuat keputusan serta strategi yang diambil oleh Turki dalam menyikapi suatu permasalahan.

4.2 Rekomendasi

Pada penulisan ini penulis menyadari jika masih banyak kekurangan dan perlu adanya koreksi yang jauh lebih baik lagi agar di penelitian selanjutnya berhasil menemukan penelitian yang lebih actual dan komprehensif. Rekomendasi yang bisa disarankan untuk penelitian berikutnya adalah diharapkan mampu untuk mengupas tuntas sejauh apa ketergantungan yang alami oleh Turki terhadap cadangan sumber daya alam dari Azerbaijan. Penelitian tersebut bisa menggunakan teori-teori yang relevan dengan keamanan energi yang dinilai mampu menjelaskan secara detail. Dengan perkembangan kerjasama yang terjalin antara Azerbaijan dengan Turki, terdapat kemungkinan Turki juga mampu untuk menjalin hubungan baik dengan negara yang menjadi musuh dalam konflik di Nagorno-Karabakh yakni

Armenia dan Rusia. Dengan menggunakan teori seperti pengambilan keputusan, penelitian berikutnya diharap mampu untuk bisa menjelaskan kejadian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdad, Muhammad Yasir. 2022. "Drone Bayraktar TB2 Sebagai Instrumen Diplomasi Pertahanan Internasional Turki." *Global Political Studies Journal* 6 (2): 135–50. <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v6i2.7817>.
- Abisatya, Kurnia. 2022. "Analisis Keterlibatan Turki Dalam Konflik Nagorno-Karabakh: Studi Kasus September War 2020." *INTELEKTIVA: Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora* 3 (5): 14–25. <https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/681>.
- Adzkia, Muhammad Rois, and Sugeng Riyanto. 2021. "Turkey'S Engagement in the Conflict of Nagorno-Karabakh." *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan* 14 (2): 100–119. <https://doi.org/10.31315/jsdk.v14i2.4833>.
- Akpınar, Pınar. 2011. "The Relations between Turkey and the Caucasus." *Perceptions* XVI (3): 53–68.
- Baumann, Matthias. 2015. "Land-Use Change in the Caucasus during and after the Nagorno-Karabakh Conflict." *Regional Environmental Change* 15 (8): 1703–16. <https://doi.org/10.1007/s10113-014-0728-3>.
- Cornell, Svante E. 2005. *The Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline : Oil Window to the West*. Central Asia-Caucasus Institute.
- Cornell, Svante E. 1998. "Turkey and the Conflict in Nagorno Karabakh: A Delicate Balance." *Studies*. Vol. 34.
- . 1999. "The Nagorno-Karabakh Conflict."

- Coskun, Orhan. 2020. "In Nagorno-Karabakh Conflict, Erdogan Eyes Turkey's 'Place in World Order.'" 2020. <https://www.reuters.com/article/armenia-azerbaijan-erdogan-analysis-int/in-nagorno-karabakh-conflict-erdogan-eyes-turkeys-place-in-world-order-idUSKBN26S0HZ/>.
- Council on Foreign Relations. 2023. "Nagorno-Karabakh Conflict." 2023. <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/nagorno-karabakh-conflict>.
- Dollah, Ramli. 2019. *Isu-Isu Terpilih Dalam Hubungan Malaysia Dengan Negara Serantau Asia Negara*.
- Evoyan, Lia. 2013. "Turkey-Azerbaijan-Relations-the-Dynamics-of-the-Development," 9–44.
- Fatoni, Muhamad Afi. 2019. "Kegagalan Upaya Mediasi Antara Armenia Dan Azerbaijan Dalam Konflik Nagorno-Karabakh Muhamad." *Journal of International Relations* 5 (3): 448–57.
- Fuller's, Liz. 2010. "OSCE, EU Condemn Karabakh 'Armed Incident.'" RadioFreeEurope RadioLiberty. 2010. https://www.rferl.org/a/OSCE_EU_Condemn_Karabakh_Armed_Incident/2079009.html.
- Giragosian, Richard. 2022. "Policy Brief Acts Of Normality : The Potential For Turkey-Armenia Rapprochement," 1–22.
- Gramer, Robbie, and Jack Detsch. 2020. "Turkey's Caucasus Adventure Risks Another Crisis in NATO." *Foreign Policy*. 2020. <https://foreignpolicy.com/2020/10/06/turkeys-caucasus-nagorno-karabakh-conflict-risks-nato-crisis-armenia-azerbaijan/>.
- Hartati, Anna Yulia. 2020. "KONFLIK AZERBAIJAN DENGAN ARMENIA ATAS WILAYAH NAGORNO-KARABAKH DALAM KONTEKS HUKUM INTERNASIONAL." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*. Vol. 13. www.bbc.com.
- Isachenko, Daria. 2020. "Turkey–Russia Partnership in the War over Nagorno-Karabakh: Militarized Peacebuilding with Implications for Conflict Transformation." *The Centre for Applied Turkey Studies*, no. 53: 1–4.
- Jafarova, Esmira. 2015. *Conflict Resolution in South Caucasus: Challenges to International Efforts*. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=wIrpBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=jafarova+Achieving+Security+and+Stability+in+the+Region+of+South+Caucasus:+What+Role+for+International+Organizations%3F&ots=kuSLjJNCe_&sig=vEJQxo8PAUnNxNVn2_8oiNJ0jIs&redir_esc=y#.
- Jazeera, Al. 2023. "Turkey Supports 'steps Taken by Azerbaijan' in Nagorno-Karabakh; Erdogan." Al Jazeera. 2023. <https://www.aljazeera.com/news/2023/9/20/turkey-supports-steps-taken-by-azerbaijan-in-nagorno-karabakh-erdogan>.
- Kardaş, Şaban. 2015. "Turkey-Azerbaijan Relations: The Economic Dimension." *Journal of Caspian Affairs*. Vol. 1. <http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jocaffairs/article/view/5000130649>.
- Kayaoglu, Barin. 2023. "After Nagorno-Karabakh Offensive, Can Turkey Play Nice with Armenia?" 2023. <https://www.al-monitor.com/originals/2023/09/after-nagorno-karabakh-offensive-can-turkey-play-nice-armenia>.

- Keddie, Patrick. 2020. "What's Turkey's Role in the Nagorno Karabakh Conflict." Al Jazeera. 2020. <https://www.aljazeera.com/features/2020/10/30/whats-turkeys-role-in-the-nagorno-karabakh-conflict>.
- Keyman, Fuat. 2017. "A New Turkish Foreign Policy: Towards Proactive 'Moral Realism'" 19 (1): 1–23.
- Khairunisa, Adilah. 2022. "Identity and Foreign Policy: Turkey's Support of Azerbaijan in the Nagorno-Karabakh Conflict." <https://doi.org/10.4108/eai.31-3-2022.2320955>.
- Kristiani, Ensi Adistya. 2013. "Nagorno-Karabakh Antara Armenia Dan Azerbaijan 2008-" 34 (34).
- Lisbet. 2020. "KONFLIK ARMENIA DAN AZERBAIJAN SERTA UPAYA DAMAI MASYARAKAT INTERNASIONAL."
- Mkrtchyan, Hasmik. 2018. "Armenia Scraps Deal with Turkey Designed to Normalize Relations." Reuters. 2018. <https://www.reuters.com/article/us-armenia-turkey/armenia-scraps-deal-with-turkey-designed-to-normalize-relations-idUSKCN1GD5BX>.
- Otzarsu, Mehmet. 2011. "Military Relations of Turkey and Azerbaijan," no. 5–14. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.30117.40163>.
- Ozil, Mesut. 2020. "Mesut Ozil Support Azerbaijan in Nagorno-Karabakh Conflict." 2020. <https://twitter.com/MesutOzil1088/status/1316072486325411841?s=20>.
- Qarayeva, Leyla. 2021. "Peran Media Sosial Sebagai Alat Propaganda Dalam Konflik Nagorno Karabakh Antara Armenia Dan Azerbaijan." *Global Political Studies Journal* 5 (2): 160–75. <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v5i2.5957>.
- Reuters Graphics. 2023. "Ethnic Armenians Flee Karabakh after Breakaway Region's Defeat." Reuters. 2023. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/turkeys-erdogan-meet-azeris-aliyev-thousands-flee-karabakh-2023-09-25/>.
- Roth, Kenneth. 2021. "Azerbaijan Events of 2021." 2021. <https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/azerbaijan>.
- Routers. 2023. "Turkey Says It Played No Direct Role in Karabakh Operation." 2023. <https://www.reuters.com/world/azerbaijan-ally-turkey-says-it-played-no-direct-role-karabakh-operation-2023-09-21/>.
- Strakes, M & E. 2017. "A Paradigm Shift in Turkish-Azerbaijani Relations? Result for Turkish Armenian Reconciliation Process Between." *Review of Socio-Economic Perspectives* 2 (1): 84–102. <https://doi.org/10.19275/RSEP010>.
- Walker, Joshua W. 2011. "Turkey's Global Strategy: Introduction: The Sources of Turkish Grand Strategy - 'Strategic Depth' and 'Zero-Problems' in Context." *The London School of Economics and Political Science*, 1.
- Waltz, Kenneth. 1979. *Theory of Internasional Politics*. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=OaMfAAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP2&dq=waltz+1979+theory+of+international+politics&ots=GM8mMiXFyQ&sig=lc0uhd3sYSv961T-zcdMKBvCRJM&redir_esc=y#v=snippet&q=bandwagoning&f=false.